

<http://jurnalmaritim.com/2014/16/745/menyoal-pemberdayaan-suku-laut>

Articles 16 Maret 2014 - 07:36:39

Menyoal Pemberdayaan Suku Laut



KARAKTER ASLI - Suasana perkampungan Suku Laut. Karakter asli mereka yang biasa hidup di laut jangan dihilangkan. (Foto: KKKS Batam)

Atik Rahmawati—*Peneliti Indigenous People, Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember. Penulis tinggal di Jember.*

MENURUT identifikasi historis komunitas dari Departemen Sosial RI dan KKKS Batam menunjukkan, sebenarnya Suku Laut di Pulau Bertam, Kota Batam, termasuk bangsa yang sudah maju (*neolithicum*) dan bagian dari kebudayaan batu besar (*megalithicum*) yang membawa adat istiadat serta budaya khas yang telah diturunkan turun-temurun, dengan kemampuan navigasi laut sebagai pengetahuan mereka hidup *survive* nomaden mengitari lautan.

Dalam artian lain, kebijakan penempatan permanen untuk kesejahteraan komunitas tidak kemudian mengesampingkan aspek survival yang telah mendarah daging. Bahwa pemberdayaan yang ditujukan pada komunitas Suku Laut haruslah memperhatikan apa sebenarnya aset atau potensi yang dimiliki komunitas.

Suku (Orang) Laut merupakan salah bukti kejayaan bangsa Indonesia sebagai penguasa laut, sekaligus menguatkan posisi Bangsa Maritim.

Implementasi program pemberdayaan Suku Laut tercatat berdasarkan data Depsos RI tahun 2006 yang dimutakhirkan tahun 2008. Data menunjukkan, Suku Laut yang merupakan Komunitas Adat terpencil (KAT) khususnya mereka yang menetap di Pulau Bertam Desa Kasu Kecamatan

Belakang Padang Kota Batam sebagai komunitas yang ‘sudah diberdayakan’, dengan pelaksanaan program dari awal tahun 1989/1990 sampai akhir tahun 1993/1994.

Pemutakhiran menunjukkan bahwa program yang semula cenderung bersifat *top down* (PKSMT) serta merta dikategorikan sebagai program bersifat *bottom up*, meskipun terjadi perubahan atas nomenklatur serta mekanisme pelaksanaan program yang pada saat program dilaksanakan dengan menggunakan istilah Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT), sedangkan pada saat pemutakhiran dengan istilah Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT).

Kedua pendekatan merupakan pendekatan yang bertolak belakang. Kecenderungan penggunaan pendekatan *top down* atau *bottom-up* dalam pelaksanaan program akan menimbulkan efek yang berbeda pada komunitas sasaran.

Kusumanegara dan Nugroho (2010) melihat, pendekatan *top down* hanya terfokus pada urusan birokrasi untuk melaksanakan keputusan politik semata dan mengesampingkan interaksi serta perasaan manusia.

Lebih dalam, Fermana (2009) dan Parsons (2008) menyatakan, dalam relasi sosial koersif yang membahas tentang siapa obyek keputusan, paradigma *top-down* gagal menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat karena keputusannya yang bersifat tirani dan elitis.

Menurut Parsons (2008), Kusumanegara (2010), dan Nugroho (2010), pendekatan *bottom-up* merupakan pendekatan yang lebih preskriptif serta mengedepankan unsur desentralisasi dalam pelaksanaan program dan sudah menjadi keharusan suatu kebijakan publik yang menganut model demokrasi dirumuskan dari bawah (*bottom up*). Lebih memungkinkan munculnya pemberdayaan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai target dari keputusan.

Ketergantungan

Namun demikian, kondisi yang terjadi adalah kecenderungan Suku Laut untuk memilih hidup stabil secara permanen di permukiman dibandingkan dengan kehidupan nomaden sebelumnya yang mereka jalani.

Kecenderungan pilihan hidup stabil di permukiman karena terwujudnya keinginan warga untuk mempersiapkan masa depan generasi penerus, terutama melalui pendidikan formal. Menjaga keselamatan jiwa keluarga, karena bisa terhindar dari bahaya keganasan cuaca laut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hidup permanen di darat merupakan pilihan yang dianggap rasional mengingat kondisi tubuh yang mulai beradaptasi dengan lingkungan darat, sehingga akan mulai merasa sakit jika dalam waktu yang lama berada di lautan.

Sifat ketergantungan Suku Laut di Pulau Bertam, Kota Batam, muncul karena program-program yang bersifat insidental (*one shot programme*) atau amal (*charity*) dan kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang (Adi, 2008).

Ketergantungan sendiri bukanlah merupakan tujuan kebijakan publik, sebagaimana pendapat Nugroho (2006) bahwa kebijakan publik terbaik adalah mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saing masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskannya ke dalam pola ketergantungan.

Pada saat pelaksanaan program, warga terbiasa menerima bantuan yang cenderung bersifat amal. Bantuan yang diperoleh warga terhenti, dan disesuaikan dengan mekanisme penyaluran program pembangunan dari pemerintah atau melalui Musrenbang.

Mekanisme Musrenbang menghendaki usulan prioritas kebutuhan dari warga setempat dengan prasyarat proposal analisis prioritas kebutuhan. Kondisi ini tentu saja mempersulit warga Bertam, karena mayoritas warga, khususnya orangtua, tidak memiliki kemampuan membaca dan berhitung.

Editor: **Arif Giyanto**